



**PERENCANAAN STRATEGIS PENINGKATAN INVESTASI
DALAM BIDANG PENANAMAN MODAL
DI PROVINSI JAWA TENGAH**

Oleh:

Nenik Woyanti, SE, MSi

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG 2005**

KATA PENGANTAR

Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Pemurah, penelitian tentang Perencanaan Strategis Peningkatan Investasi dalam Bidang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan penelitian ini memuat gambaran daerah studi, analisis data, strategi peningkatan investasi dan perencanaan strategis dalam bidang penanaman modal tahun 2005-2009.

Kepada semua pihak yang turut membantu kelancaran dan keberhasilan penulisan laporan ini, mulai perancangan hingga penulisan laporan, saya ucapkan terima kasih.

Saya berharap, laporan ini dapat bermanfaat sebagai bahan acuan dalam rangka pembuatan kebijakan bagi pihak-pihak yang terkait.

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	<i>i</i>
DAFTAR ISI	<i>ii</i>
DAFTAR TABEL	<i>iv</i>
DAFTAR GAMBAR	<i>v</i>
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	4
1.3 Manfaat	4
1.4 Landasan Hukum	5
1.5 Ruang Lingkup	6
BAB II DISKRIPSI DAERAH STUDI	
2.1 Latar Belakang	7
2.1.1 PDRB Dan Perkembangannya	8
2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi	9
2.1.3 Kontribusi Setiap Lapangan Usaha	9
2.2 Potensi Sumber Daya	11
2.2.1 Sumber Daya Manusia	11
2.2.2 Sumber Daya Alam	13
2.3 Penanaman Modal di Jawa Tengah	25
2.3.1 Kondisi Internal dan Eksternal	25
2.3.2 Kerjasama Penanaman Modal	26
2.3.3 Perkembangan Penanaman Modal di Jawa Tengah	27
BAB III PUSTAKA & METODE PENDEKATAN	
3.1 U m u m.....	28
3.2 Tantangan dan Peluang Investasi di Daerah	28
3.3 Perkembangan dan Sasaran Umum Investasi	29
3.4 Alokasi dan Ketimpangan Investasi	30
3.5 Kebijakan Investasi	31
3.6 Determinan Investasi Swasta	32

3.7	Metode Pendekatan	33
3.8	Tahapan Pelaksanaan.....	34
3.8.1	Tahap Pengumpulan Data.....	34
3.8.2	Tahap Analisis	36
3.8.2.1	Analisis SWOT.....	36
3.8.2.2	Shift Share.....	42
3.8.2.3	Location Quotient (LQ).....	43
3.9	Kriteria Keberhasilan Strategi	45

BAB IV ANALISIS DATA

4.1	Umum.....	47
4.2	LQ (Location Index)	48
4.3	Shift Share	51
4.4	Klasifikasi Pertumbuhan Perekonomian	59
4.5	SWOT	64
4.6	Target Investasi	73

BAB V STRATEGI PENINGKATAN INVESTASI

5.1	Rutin	77
5.2	Pembangunan	78

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1.	<i>Produk Domestik Regional Brutto Jawa Tengah Tahun 1998 – 2002 dan Perkembangannya atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 1993.</i>	8
Tabel 2.2.	<i>Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi per Tahun Jawa Tengah Tahun 1998 – 2002</i>	9
Tabel 2.3.	<i>Distribusi Presentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Propinsi Jawa Tengah atas Dasar Harga Dasar Konstan 1993</i>	10
Tabel 2.4.	<i>Wilayah Kabupaten / Kota di Propinsi Jawa Tengah</i>	12
Tabel 2.5.	<i>Kondisi Sarana dan Prasarana Transportasi di Jawa Tengah</i>	18
Tabel 2.6.	<i>Pertumbuhan Kapal Barang/Penumpang di Pelabuhan Tanjung Emas</i>	20
Tabel 2.7.	<i>Kecenderungan Jumlah Penumpang dan Barang di Bandara A. Yani Semarang</i>	21
Tabel 2.8.	<i>Kondisi Sarana dan Prasarana Industri dan Perdagangan di Propinsi Jawa Tengah, 2002</i>	22
Tabel 2.9.	<i>Kondisi Sarana dan Prasarana Hotel dan Pariwisata di Propinsi Jawa Tengah, 2002</i>	23
Tabel 2.10.	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan di Propinsi Jawa Tengah, 2002</i>	24
Tabel 2.11.	<i>Perkembangan Investasi di Propinsi Jawa Tengah Tahun 1998 – 2001</i>	27
Tabel 2.12.	<i>Perkembangan Investasi di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2000 - 2001</i>	27
Tabel 3.1.	<i>Kerangka Formulasi Perencanaan Strategi</i>	34
Tabel 3.2.	<i>Matrik Faktor Stategis Eksternal</i>	38
Tabel 3.3.	<i>Matrik Faktor Stategis Internal</i>	40
Tabel 3.4.	<i>Matrik SWOT</i>	41
Tabel 3.5.	<i>Penentuan Matrik Grand Strategy</i>	42
Tabel 4.1.	<i>Jenis Lapangan Usaha Potensial Menurut Nilai LQ di Propinsi Jawa Tengah, Tahun 2002</i>	49
Tabel 4.2.	<i>Jenis Lapangan Usaha Potensial Menurut Nilai LQ Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah, Tahun 2002</i>	50
Tabel 4.3.	<i>Hasil Perhitungan Net Shift Setiap Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah, Tahun 2001 - 2002 Berdasarkan PDRB atas Dasar Harga Konstan 1993</i>	54
Tabel 4.4.	<i>PDRB Perkapita Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah, Tahun 2002</i>	56
Tabel 4.5.	<i>Tipologi Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002</i>	57
Tabel 4.6.	<i>Nilai LQ dan Dj Pada berbagai Sektor Usaha di Propinsi Jawa Tengah</i>	59
Tabel 4.7.	<i>Faktor-faktor yang Dipergunakan untuk Analisa EFAS maupun IFAS</i>	65
Tabel 4.8.	<i>Faktor Internal (Internal Factor Analysis Summary)</i>	66
Tabel 4.8.	<i>Faktor Eksternal (External Factor Analysis Summary)</i>	69

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1. Pendekatan Penyusunan Rencana Strategik	33
Gambar 4.1. Posisi Perekonomian Tiap Kabupaten Di Jawa Tengah Menurut Tipologi Klassen, 1999-2001	61
Gambar 4.2. Posisi Perekonomian Propinsi Jawa Tengah.....	64
Gambar 4.3. Strategi SO.....	72
Gambar 4.4. Matrik Internal Ekstenal (I-E)	73

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam pembangunan ekonomi Jawa Tengah yang mempunyai Misi Kemandirian Wilayah dalam suatu kerangka paradigma pembangunan ekonomi dewasa ini, yang mempunyai beberapa karakteristik : *borderless*, *competitiveness* dan sinergis yang diwujudkan melalui suatu *joint cooperation*, maka keberadaan suatu lembaga yang menangani masalah investasi seperti halnya BPM dalam menarik investasi menjadi semakin penting. Paradigma pembangunan ekonomi dewasa ini usaha untuk menarik investasi dihadapkan pada permasalahan yang kompleks, yaitu diantaranya adanya tingkat persaingan yang tajam dalam menarik investasi, baik yang dilakukan antar negara, antar propinsi maupun antar kabupaten/kota dalam suatu negara, masalah tuntutan pelayanan dari para investor yang semakin besar, masalah stabilitas politik dan keamanan, kepastian hukum, perburuhan serta krisis ekonomi regional dan nasional mempunyai dampak terhadap minat untuk mengadakan investasi baik dari dalam negeri (PMDN) maupun dari luar negeri (PMA).

Dalam rangka usaha menarik investasi ke Jawa Tengah, ditengah-tengah kondisi perekonomian yang bergerak menuju pemulihan dari krisis multidimensional, maka sektor swasta merupakan salah satu sarana untuk mengantarkan dinamika pembangunan ekonomi masyarakat guna menuju pada tahapan pemulihan ekonomi.

Mengingat begitu strategisnya misi yang dipikul oleh sektor swasta guna mewujudkan pemulihan dimaksud, maka sudah sewajarnya apabila segenap daya dan upaya dikerahkan untuk mengoptimalkan segala potensi yang selama ini terbukti telah memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional khususnya Propinsi Jawa Tengah.

Tantangan dimasa depan dalam rangka untuk menarik investasi akan lebih besar, karena dalam situasi pertumbuhan ekonomi dunia saat ini, akan menyebabkan tingkat persaingan yang semakin tajam dalam menarik investasi antar negara. Untuk itulah program dan proyek yang berhubungan dengan pengembangan investasi haruslah mendapatkan

suatu *feed back* (umpan balik), dengan harapan program dan proyek tersebut dimasa mendatang akan semakin terarah sesuai dengan arah/ trend perkembangan ekonomi dunia, sehingga daya saing Jawa Tengah dalam menarik investor akan menjadi semakin tinggi.

Kondisi demikian menitik-beratkan pada keperluan BPM dalam perencanaan pengembangan penanaman modal yaitu dengan melakukan Perencanaan Strategis Pengembangan Penanaman Modal di Jawa Tengah, dengan memperhatikan permasalahan global, potensi daerah, perkembangan realisasi penanaman modal, kendala serta permasalahan yang selama ini dihadapi, serta sasaran-sasaran penanaman modal yang telah ditetapkan baik dalam PROPEDA Propinsi Jawa Tengah, PROPETADA, TUPOKSI BPM, serta Visi dan Misi BPM, serta RENSTRA BPM.

Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001 – 2005 telah ditetapkan sebagai Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2001 tanggal 17 April 2001. Dasar penyusunan PROPEDA Jawa Tengah antara lain mengacu kepada Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang PROPENAS tahun 2000 – 2004; PP No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi Sebagai Daerah Otonom; dan PP. No. 104 tahun 2000 tentang Dana Perimbangan.

Jenjang tahapan perencanaan pembangunan antara lain : Di Tingkat Pemerintah Pusat : GBHN (Tap MPR No. IV/1999) yang kemudian dijabarkan kedalam PROPENAS (Program Pembangunan Nasional) tahun 2001 – 2005. PROPENAS ini selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Nasional (REPETANAS) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selanjutnya, di tingkat daerah perlu disusun Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) dengan mengacu pada GBHN, PROPENAS serta kepentingan dan keperluan lokal Propinsi untuk pembangunan daerah setempat.

Di Propinsi Jawa Tengah Program Pembangunan Daerah atau PROPEDA 2001–2005 seperti tertuang dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2001 tanggal 17 April 2001 digunakan sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Tahunan yang disebut RAPETADA (Rencana Pembangunan Tahunan daerah). REPETADA disusun berdasarkan atas hasil RENSTRA (rencana strategis) dari masing-masing Dinas/ Instansi/ Badan di lingkungan Propinsi Jawa Tengah. Setelah REPETADA tersusun akan dipakai sebagai acuan APBD dalam RAKORBANG (Rapat Koordinasi Pembangunan) Jawa Tengah.

Tujuan pelaksanaan pembangunan Jawa Tengah adalah mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata baik material maupun spiritual. Cita-cita mulia pembangunan tersebut dapat terwujud apabila prioritas pembangunan diletakkan pada bidang ekonomi sebab keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi diharapkan dapat mendorong dan sekaligus menjadi dasar bagi pembangunan di bidang lainnya yang lebih komprehensif.

Salah satu bentuk pembangunan ekonomi adalah menggali dan mengolah kekayaan ekonomi yang masih bersifat potensial menjadi kekuatan ekonomi yang lebih nyata dan riil yang selanjutnya dapat terealisasi melalui upaya pelaksanaan dan pengembangan kegiatan di bidang investasi. Keberhasilan kegiatan investasi serta upaya pengembangannya diharapkan dapat menjadi landasan pacu sekaligus pendorong bagi kegiatan lain yang berkaitan yang mengarah pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, penyerapan tenaga kerja, alih teknologi, perbaikan kualitas sumber daya manusia, konservasi sumber daya alam, dan peningkatan pendapatan daerah. Keberhasilan pembangunan ekonomi Jawa Tengah lebih ditujukan pada peningkatan stabilitas, pemerataan, pertumbuhan dan pengembangan ekonomi daerah yang pada akhirnya diharapkan berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat luas.

Dari gambaran di atas, penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) di tiap-tiap instansi atau Badan di tingkat Propinsi Jawa Tengah merupakan acuan penting dalam pelaksanaan pembangunan Jawa Tengah. Dalam bidang Penanaman Modal di Propinsi Jawa Tengah, Badan Penanaman Modal Propinsi (BPM) Propinsi Jawa Tengah perlu merumuskan RENSTRA BPM untuk tahun 2005 - 2009 yang merupakan Perencanaan Strategis selama jangka waktu lima tahun kedepan (2005-2009). Dengan berdasarkan pada RENSTRA ini, dapat dirumuskan REPETA BPM yang berisi program-program dan kegiatan-kegiatan tiap-tiap tahun yang disusun dengan mengacu pada PROPEDA, PROPETADA, RENSTRADA, TUPOKSI BPM, Peraturan dan Kebijakan bidang Penanaman Modal yang berlaku, realisasi penanaman modal selama lima tahun kebelakang, serta dengan melihat pada potensi daerah.

Perencanaan Strategis ini sangat penting artinya sebagai pedoman dalam pelaksanaan peningkatan dan pengembangan penanaman modal dari tahun ke tahun selama lima tahun ke depan, serta merupakan bahan masukan dan pertimbangan dalam penyusunan REPETADA dan penyusunan APBD setiap tahunnya.

Menurut Yuwono, (2003) terdapat beberapa manfaat yang dapat dipetik dari penyusunan perencanaan strategis (Renstra). *Pertama*, Renstra dapat digunakan sebagai alat pandu yang akan memfasilitasi arah aktivitas organisasi, artinya segala hasil olah pikir dan tindakan strategis akan terbantu melalui penyediaan Renstra sehingga target yang telah

ditetapkan dapat tercapai. **Kedua**, keberadaan Renstra mampu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan sebab Renstra bukanlah sebuah sub-elemen tertentu dalam sebuah organisasi tetapi lebih merupakan proses sinergis dari berbagai elemen yang ada di dalam sebuah organisasi. **Ketiga**, melalui Renstra akan tercipta peningkatan *responsiveness* sebuah organisasi sehingga mampu menciptakan kinerja (*performance/achievement*) yang maksimal, sebab eksistensi Renstra mampu merangsang motivasi organisasi untuk bekerja secara serius guna merealisasikan berbagai tindakan dan keputusan yang telah dirumuskan. Dan **keempat**, Renstra mampu melayani '*need of achievement*' bagi para pelakunya terutama dalam upaya merealisasikan komitmen untuk memajukan organisasi secara simultan dari seluruh tahapan kebijakan publik.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari pekerjaan ini adalah melakukan penyusunan Rencana Strategis Pengembangan Penanaman Modal untuk periode waktu 2005-2009 yang lebih operasional, realistis, partisipatif, serta terpadu sehingga sasaran peningkatan penanaman modal dapat tercapai dengan baik.

1.3. Manfaat

Penyusunan Perencanaan Strategis Pengembangan Penanaman Modal Tahun 2005 – 2009 ini dimaksudkan :

- Sebagai pedoman pelaksanaan pengembangan penanaman modal tahun 2005 - 2009 yang sesuai dengan Visi dan Misi BPM, TUPOKSI BPM serta dengan mengoptimalkan potensi-potensi propinsi yang ada ;
- Sebagai pedoman dalam perencanaan tahunan (REPETA BPM) yang selanjutnya dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan anggaran rutin maupun pembangunan ;
- Diperlukan untuk pengelolaan pencapaian hasil (target) yang diharapkan ;
- Diperlukan untuk mengantisipasi adanya perubahan bidang penanaman modal, perdagangan, dan perekonomian yang semakin kompleks.

1.4. Landasan Hukum

Penyusunan Perencanaan Strategis Pengembangan Penanaman Modal ini dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti :

1. Undang-undang Nomor 10 tahun 1950, tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah.
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000, tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 395).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000, tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021).
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang PROPEDA Propinsi Jawa Tengah 2001 – 2005.

1.5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pekerjaan Penyusunan Rencana Strategis Pengembangan Penanaman Modal di Propinsi Jawa Tengah meliputi :

1. Pengumpulan produk-produk peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan bidang Penanaman Modal,
2. Pengumpulan data-data yang terkait seperti potensi daerah, realisasi penanaman modal, permasalahan, serta kendala yang dihadapi, kondisi-kondisi eksternal yang terkait, relevan, dan berpengaruh, serta sasaran-sasaran yang akan dicapai,
3. Perumusan permasalahan-permasalahan serta perumusan strategis pemecahan masalahnya dengan mengacu pada kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman yang relevan,
4. Melakukan penjaringan aspirasi baik dari instansi swasta maupun dari instansi pemerintah Kabupaten/ Kota maupun dari instansi di tingkat Propinsi,
5. Melakukan *focused group discussion* (FGD) mengenai strategi pengembangan penanaman modal dengan instansi-instansi terkait,